

RINGKASAN

Realisasi belanja APBD Jawa Tengah menjadi yang tertinggi kedua di Pulau Jawa pada tahun 2017-2022 dengan rata-rata sebesar 144,16 persen yang seharusnya menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efisien. Namun, pada kenyataannya tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, kenaikan IPM, maupun penurunan persentase jumlah penduduk miskin. Jawa Tengah memiliki kinerja paling tidak optimal karena menduduki peringkat di bawah rata-rata dibanding provinsi lainnya di Pulau Jawa pada tahun 2017-2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan efektivitas biaya penggunaan anggaran pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2017-2022 dengan variabel pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, IPM, dan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode MinMax untuk menentukan skor peringkat dengan membandingkan nilai antar daerah.

Hasil penelitian menunjukkan Kota Semarang memiliki kinerja paling baik dan Kabupaten Brebes memiliki kinerja paling rendah. Skor efektivitas biaya tinggi di Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga menunjukkan bahwa kinerja tinggi dapat dicapai dengan efisiensi yang baik. Di sisi lain, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Pemalang memiliki efektivitas biaya yang rendah, menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi anggaran dan kinerja.

Implikasi dari penelitian ini adalah daerah dengan kinerja dan efektivitas biaya rendah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah harus merumuskan pengeluaran yang dapat menjadi investasi. Pengalokasian dana untuk program produktif dan peningkatan pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikelola dengan bijak agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat lokal maupun wisatawan dan menjadi daya tarik sehingga dapat memberikan *multiplier effect* untuk masing-masing daerah.

Kata Kunci: efisiensi, efektivitas, kinerja, pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan, PDRB, anggaran, MinMax

SUMMARY

The realization of Central Java APBD is the second highest in Java Island in 2017-2022 with an average of 144.16 percent which should describe the performance of efficient governance. However, in reality it is not accompanied by economic growth, an increase in HDI, or a decrease in the percentage of poor people. Central Java has the least optimal performance because it is ranked below average compared to other provinces in Java Island in 2017-2022.

This study aims to analyze the performance and cost-effectiveness of budget use in 35 districts/cities in Central Java in 2017-2022 with variables of GDP growth, GDP per capita, HDI, and poverty. This research is a descriptive quantitative research using secondary data. The research used the MinMax method to determine ranking scores by comparing scores between regions.

The results showed high variations in performance and cost-effectiveness between regions. Semarang City has the best performance and Brebes Regency has the lowest performance. The cost-effectiveness between regions also shows high variation. Semarang City, Surakarta City, and Salatiga City show that high performance can be achieved with good efficiency. On the other hand, Kebumen Regency, Banjarnegara Regency, and Wonosobo Regency have low cost-effectiveness, indicating the need for improved budget efficiency and performance.

The implication of this study is that areas with low performance and cost-effectiveness need to improve the effectiveness of budget use to be more targeted. Local governments must formulate expenditures that can become investments. The allocation of funds for productive programs and improvement of community services needs to be improved and managed wisely in order to provide satisfaction to local communities and tourists and become an attraction so that it can provide a multiplier effect for each region.

Keywords: *efficiency, effectiveness, performance, economic growth, HDI, poverty, GRDP, budget, MinMax*